

# Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terhadap Manajemen Organisasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dasep Gumilar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam KH Badruzzaman Garut, Indonesia ; gumilardasep@gmail.com

**Abstrak** : The aim of this research is to analyze the influence of the implementation of rural infrastructure development program policies on the effectiveness of management of local community organizations in improving public facility services for poor communities in rural areas. The methodology used in this study is qualitative analysis which uses rational rules to analyze causal-effectual relationships between variables. The results of the study show that the implementation of rural infrastructure development program policies has a positive influence on the effectiveness of management of local community organizations to improve public facility services for poor communities in rural areas.

**Kata Kunci:** *Policy, Management, Public Service*

## 1. Pendahuluan

Sumberdaya alam yang melimpah dan letak geografis Indonesia yang strategis merupakan modal utama bagi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya namun melimpahnya sumberdaya belum bisa secara nyata mensejahterakan rakyatnya, ini dapat dilihat Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia masih tinggi, ditandai dengan kerentanan ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan penduduk perdesaan untuk menyampaikan aspirasi. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan usaha dan intervensi semua pihak dalam pembangunan secara berkesinambungan (Nurwati, 2008; Umar, 2018).

Pembangunan infrastruktur perdesaan adalah salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah perdesaan dari sumber-sumber informasi dan penghubung ke pusat-pusat Sosial dan aktifitas ekonomi (Onnoa et al., 2021). Selain itu, Pembangunan infrastruktur perdesaan memudahkan jangkauan penduduk ke pusat-pusat pelayanan sosial,

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science Vol 3 No 2 November 2022  
<https://doi.org/10.3390/idarotuna>

Received: September 30, 2022  
Accepted: October 17, 2022  
Published: November 29, 2022

**Publisher's Note:** Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

budaya dan ekonomi sehingga tarap kehidupan masyarakat desa akan terus meningkat (Bakri, 2015).

Dalam upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan berbagai program salah satu diantaranya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah naungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Melalui PPIP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, sangat miskin dan kaum perempuan dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Poluan et al., 2021).

Mampu secara signifikan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan di Desa sasaran program. Hal ini menandakan bahwa kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) belum dilaksanakan secara optimal sehingga efeknya belum mampu meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di Desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (JANNAH, 2016).

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan infrastruktur dasar yang baik Manajemen Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai ujung tombak pelaksana program, diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya dari berbagai aspek (Djamhari et al., 2022). Berbagai pakta menunjukan Manajemen Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) belum melaksanakan program dengan optimal hal ini dapat dilihat dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) belum mampu secara signifikan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur perdesaan di Desa sasaran program (Dahlan et al., 2012). Hal ini menandakan bahwa kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) belum dilaksanakan

secara optimal sehingga efeknya belum mampu meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di Desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) (FITRIANI et al., 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam paper ini akan membahas tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan program pembangunan infrastruktur perdesaan terhadap efektifitas manajemen organisasi masyarakat setempat dalam meningkatkan pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat miskin di perdesaandi Kab. Garut

## **2. Metode**

Model kajian dalam paper ini menggunakan analisis kualitatif, yang meninjau hubungan kasusal efektif antar variabel. Model analisis ini menggunakan pendekatan analisis rasional yang diperkuat/ dikonfirmasi dengan hasil penelitian dan/ atau tinjauan pustaka yang membahas topik-topik yang relevan dengan fokus penelitian (Yaumi, 2016).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Fokus penelitian yang akan dilakukan berhubungan dengan konsep administrasi negara, karena dinamika administrasi negara tidak lepas dari persoalan kepentingan masyarakat (*public Interest*) di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan, yang mempunyai ciri-ciri pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen, karena menyangkut kepentingan semua masyarakat. Gejala-gejala ini kemudian harus ditangkap dan diakumulasikan serta diformulasikan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan di mana kegiatan-kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya.

Wado (dalam Iskandar, 2005) mendefinisikan administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara dan pemerintahan (Iskandar, 2020). Administrasi Negara juga berkaitan erat dengan manajemen pemerintahan, berangkat dari sebuah pemikiran bahwa faktor utama dalam suatu Administrasi Publik

(*Public Administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada termasuk organisasi serta sumber daya yang tersedia adalah manajemen pemerintahan (*Public Management*). Karena itu, manajemen tidak lain adalah faktor utama dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga dan masyarakatnya (Sawir & Sos, 2021), selanjutnya Kristiadi dalam Iskandar mengemukakan bahwa, tugas pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik dan memberikan pelayanan (Khusaini, 2019).

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. kebijakan publik seperti halnya pengertian kebijakan ada bermacam-macam (Wahab, 2021). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusan. Banyak orang memberikan penafsiran bahwa public policy adalah hasil dari suatu pemerintahan, sedangkan administrasi negara adalah sarana untuk mempengaruhi terjadinya hal-hal tersebut sehingga public policy lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat (Hidayat, 2019).

Thoha dalam Sutmasa menjelaskan pengertian tentang Kebijakan Publik adalah (Sutmasa, 2021):

*“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah hasil dari suatu pemerintahan, sedangkan administrasi negara adalah sarana untuk mempengaruhi terjadinya hal-hal tersebut, sehingga Kebijakan Publik lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat”*

Sejalan dengan pendapat tersebut, mengatakan bahwa (Ananda et al., 2021):

*“Kebijakan Publik adalah keputusan yang diambil di dalam proses administrasi Negara, akan tetapi keputusan yang menjadi Kebijakan Publik hanyalah keputusan-keputusan yang mengandung nilai-nilai demi kepentingan masyarakat (Public interest) dan merupakan keputusan yang baik. Kebijakan Publik sewbagai suatu keputusan harus mengandung dua hal, yaitu: pertama, merupakan ethical proposition dan kedua, merupakan factual proposition”.*

(Wahab, 2021) mengatakan bahwa :

Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang serba acak dan kebetulan.

Kedua, kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Ketiga, kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang sengaja dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

Keempat, kebijakan publik mungkin bersifat positif mungkin bersifat negatif.

Menurut (Monoarfa, 2012) di dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Pelayanan publik menurut definisi diatas dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini adalah pemerintah (birokrat) harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siti Maryam, 2017).

#### **1. Pelaksanaan Kebijakan Program PPIP**

Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Iskandar). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan upaya memahami dan mengartikan apa yang atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah, apa yang menyebabkan atau yang

memengaruhi, dan apa pengaruh dan dampak kebijakan publik tersebut. Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan: 1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) atau pemerintah mengenai suatu masalah; 2) apa yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi; dan 3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut (Herdiana, 2018).

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Bahwa pelaksanaan kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan (Kusnadi & Baihaqi, 2020).

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan publik, Edwards III secara lebih rinci dan jelas menerangkan bahwa ada 4 (empat) faktor kritis dalam kebijakan yang saling berpengaruh satu sama lain (Herdiana, 2018), keempat faktor tersebut yaitu:

a. Komunikasi (*communication*)

Prasyarat utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana.

b. Sumber daya (*Resources*)

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila imlementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

c. Sikap pelaksana (Disposisi)

Disposisi atau sikap pelaksana yang diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

d) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan Red-Tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Keempat faktor tersebut (komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi) saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan suatu sistem yang saling ketergantungan dimana suatu kebijakan tidak dapat mencapai sasaran jika salah satu komponennya tidak berfungsi. Di dalam pelaksanaan kebijakan tenaga fungsional dokter sangat diperlukan keempat faktor tersebut untuk meningkatkan kinerja dokter dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pendapat tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan publik mulai memegang peranan dalam setiap kajian ilmu administrasi negara. Semenjak administrasi negara mempunyai sikap yang berorientasi pada aplikasi, maka studi ini mempunyai perhatian khusus terhadap kebijakan publik. Keterkaitan antara administrasi negara dengan kebijakan publik sangat terlihat pada perkembangan paradigma administrasi negara. (Thoha, 2017) menjelaskan bahwa paradigma administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah

ilmu kebijakan, politik, ekonomi, proses pembuatan kebijakan pemerintah dan analisisnya, serta cara pengukuran dari hasil-hasil kebijakan yang telah dibuat.

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dengan memperhatikan pendapat Udoji, dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian dan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Tiza et al., 2014).

## **2. Manajemen OMS**

Iskandar mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang sangat khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Lebih lanjut Iskandar mengatakan bahwa proses tersebut mempunyai penetapan yang bersifat universal. Hal ini sangat penting karena mempunyai arti bahwa fungsi-fungsi manajemen dapat dibedakan antara fungsi organik dan fungsi yang bersifat pelengkap (Aceh, 2022)(Afifah et al., 2022).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang menitikberatkan pada usaha memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuannya. Agar tercapainya suatu tujuan maka orang-orang di dalam organisasi harus jelas wewenang, tanggung jawab, dan tugas pekerjaannya (Larasati, 2018).

Manajemen sebagai suatu proses yang menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, proses disini berarti suatu cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Proses itu dijelaskan juga oleh Stoner (dalam Ramdhani, 2003) yang mengatakan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Solihin (2006) yang menjelaskan bahwa proses manajemen adalah pelaksanaan serangkaian fungsi manajemen yang dilakukan oleh para manajer untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi tersebut mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*).

Daft (2000) menyebutkan bahwa manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya organisasi.

Selanjutnya Handoko (2000) mengemukakan manajemen merupakan bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan.

Gullick (dalam Iskandar, 2005) menjelaskan tentang fungsi manajemen yang terdiri dari :

1. Dimensi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta, membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi perencanaan yaitu : a) kebijakan dan standar, b) pengembangan rencana, c) evaluasi efektivitas proses perencanaan.

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2000:108) bahwa perencanaan dapat didefinisikan sebagai berikut :

Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan

Dengan kata lain, pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis serta didasarkan kepada tujuh langkah tertentu yaitu :

- a. Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi

- b. Kumpulan data-data
- c. Penganalisaan data-data
- d. Penentuan beberapa alternative
- e. Memilih cara yang kelihatannya terbaik
- f. Pelaksanaan
- g. Penilaian hasil yang dicapai

Sehingga perencanaan merupakan suatu garis besar apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

## 2. Dimensi Pengorganisasian (*Organizing*)

Selain diperlukan sebuah perencanaan, maka selanjutnya diperlukan sebuah pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai fungsi organik manajemen ialah “ Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2000:116).

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian dapat memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pada dimensi pengorganisasian terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi, yaitu : a) pembagian tugas dan pekerjaan, b) evaluasi pengorganisasian dan c) koordinasi.

## 3. Dimensi Penyusunan Pegawai (*Staffing*)

Penyusunan pegawai adalah semua hal yang berkaitan dengan seleksi dan perekrutan personil/pegawai atau kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan.

Indikator dari penyusunan pegawai (*staffing*) antara lain :

- a. Penentuan kebutuhan pegawai, adalah proses menentukan apakah suatu organisasi membutuhkan pegawai atau tidak;
- b. Pengadaan dan perekrutan, adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan

karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Training dan pengembangan pegawai, adalah suatu proses dimana pegawai yang ada akan diberikan pendidikan dan latihan agar terjadi suatu peningkatan sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut.

#### 4. Dimensi Pengarahan (*Directing*)

*Directing* (pengarahan) adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dalam dimensi pengarahan, terdapat indikator-indikator, yaitu : a) pemberian petunjuk, b) pemberian motivasi, dan c) evaluasi hasil kerja.

#### 5. Dimensi Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Pengkoordinasian (*coordination*) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator pengkoordinasian meliputi hubungan antar unit dan memberikan keterangan.

#### 6. Dimensi Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan (*reporting*) merupakan fungsi terakhir dari manajemen, artinya proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pelaporan yaitu aktivitas untuk menjaga supervisor dan bawahannya memperoleh informasi tentang aktivitas seseorang. Indikator pelaporan adalah : a) laporan, b) audit, dan c) akuntabilitas.

#### 7. Dimensi Penganggaran (*Budgeting*)

Anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang yang berhubungan dengan perencanaan keuangan, akuntansi dan mengontrol tugas manajemen.

Indikator anggaran (*budgeting*) meliputi: a) perencanaan sumber anggaran, b) pengalokasian anggaran, c) penggunaan anggaran, dan d) evaluasi pengelolaan anggaran.

### **3. Mutu Pelayanan Kesehatan**

Menurut Sinambela di dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik dapat (Herdiana, 2018)didefinisikan sebagai berikut:

“Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Pelayanan publik menurut definisi diatas dikatakan bahwa pelayanan public merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini adalah pemerintah (birokrat) harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siti Maryam, 2017).

Secara teoritis menurut sinambela (Sinambela, 2006) dalam bukunya, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. *Transparansi*, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. *Akuntabilitas*, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Kondisional*, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. *Partisipatif*, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- d. *Kesamaan hak*, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, golongan, agama, status sosial, dan lain-lain.

- e. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan infrastruktur perdesaan akan berdampak terhadap epektifitas Manajemen Organiasai setempat, karena dalam kebijakan program pembangunan infrastruktur perdesaan sudah diatur tugas pokok dan fungsi organisasi masyarakat setempat dalam memberikan pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat miskin perdesaan, dengan epektifitas manajemen organisasi masyarakat setempat yang baik maka akan berpengaruh terhadap terwujudnya pelayanan pasilitas umum bagi masyarakat perdeaan yang optimal.

## **5. Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan program pembangunan infrastruktur perdesaan berpengaruh secara positif terhadap manajemen organisasi masyarakat setempat dalam meningkatkan pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat miskin perdesaan. Sedangkan pada masing – masing sub-sub hipotesis yang diajukan menunjukan antar variable penelitian berpengaruh secara posotifdan signipikan.

## **Referensi**

- Aceh, P. P. (2022). *Kerangka sistem*.
- Afifah, R., Nurjaman, U., & Fatkhulloh, F. K. (2022). Implementasi Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Di Lembaga Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 936. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.973>
- Ananda, R. F., Rosyidi, B., & Zetra, A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Niara*, 14(1), 149–160.
- Bakri, N. (2015). Evaluasi Program Pembangunan Jaringan Jalan Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Universitas Hasanuddin*.
- Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan (PPIP) Di Desa

- Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Djamhari, E. A., Layyinah, A., Mardhiyyah, M., & Wibowo, E. B. (2022). *Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat)*.
- FITRIANI, R. D., Ismanto, G., & Nugroho, K. S. (2018). *Implementasi Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Kecamatan Kasemen*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- Hidayat, E. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 8–16.
- Iskandar, I. (2020). Pengaturan Pengelolaan Air Tanah Di Daerah (Ius Constituendum). *Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal*, 2(1), 14–25.
- JANNAH, A. M. (2016). *Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pesawaran*.
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Larasati, S. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Deepublish.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1.
- Onnoa, R., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Perencanaan Pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106).
- Poluan, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2021). Efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa (studi di desa elusan kecamatan amurang barat kabupaten minahasa selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(111).
- Sawir, M., & Sos, S. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Deepublish.
- Sinambela, A. (2006). *Doha Development Agenda Negotiations On Agricultural*

Sector. *Indonesian J. Int'l L.*, 4, 467.

Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.

Thoah, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.

Tiza, A. L., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Implementasi program pembangunan desa mandiri anggaran untuk rakyat menuju sejahtera (anggur merah)(studi di badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten timor tengah utara). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(1), 58–67.

Umar, M. A. (2018). Bonus demografi sebagai peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah. *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(2).

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Yaumi, M. (2016). *Action Research: Teori, model dan aplikasinya*. Prenada Media.